

Analisis Proses Penganggaran Pada Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung

Wulan Safitri

Program Studi Manajemen STIE STEMBI, wulancepighasby@gmail.com

Abstrak

Tujuan_Penelitian ini bertujuan untuk : 1) Mengetahui peraturan pembuatan anggaran pada Rumah Sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti RSKIA; 2) Memahami proses penyusunan anggaran pada RSKIA Kota Bandung; 3) Mengetahui unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran di RSKIA Kota Bandung

Desain/Metode_ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis analisis deskriptif

Temuan_Sistem penganggaran di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung sudah sesuai dengan aturan

Implikasi_Penelitian ini dapat memberikan informasi awal untuk bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

Originalitas_Belum pernah ada penelitian dengan topik dan pendekatan yang sama di Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak.

Tipe Penelitian_ Studi Empiris

Kata Kunci : Penganggaran, Proses, BLUD

I. Pendahuluan

Pelayanan kesehatan merupakan upaya dari suatu organisasi kesehatan yang diberikan dalam rangka memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan, mencegah dan memulihkan penyakit bagi masyarakat. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat perlu adanya fasilitas kesehatan yang dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum.

Arti pentingnya rumah sakit juga diatur dalam UU RI No. 44 Tahun 2009 dimana disebutkan bahwa rumah sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. Rumah sakit tidak hanya berfungsi untuk memberikan pelayanan medis tetapi juga menyelenggarakan kegiatan pelayanan dan asuhan keperawatan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan kesehatan kemasyarakatan, rujukan, pendidikan, penelitian, pengembangan, administrasi umum dan keuangan, Sesuai dengan visi misi RSKIA Kota Bandung

Rumah sakit adalah pusat pelayanan kesehatan yang sangat penting dalam masyarakat yaitu melakukan pelayanan melalui pendekatan kesehatan (promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif) dan dilaksanakan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumah sakit juga dituntut untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik. Sebuah kualitas rumah sakit dapat berpengaruh pada citra rumah sakit tersebut. Untuk itu rumah sakit harus memiliki pengorganisasian dan manajemen yang baik.

Tujuan dari penelitian ini adalah: 1) Mengetahui peraturan pembuatan anggaran pada Rumah Sakit dengan status Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak (RSKIA) Kota Bandung; 2) Memahami proses penyusunan anggaran

pada RSKIA Kota Bandung; 3) Mengetahui unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran di RSKIA Kota Bandung

II. Kajian Teori

Anggaran menurut RA Supriyono adalah suatu rencana terinci yang di nyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, biasanya dalam satuan uang, untuk perolehan dan penggunaan sumber-sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, biasanya satu tahun..Menurut Gunawan Adisaputro Anggaran adalah suatu pendekatan formal dan sistematis daripada pelaksanaan tanggung jawab manajemen di dalam perencanaan, koordinasi dan pengawasan. Haruman, Tendi (2007:3)

Penganggaran (Budgeting) adalah proses penyusunan anggaran. Proses Penganggaran yang dilaksanakan untuk menyusun sebuah induk anggaran adalah vital bagi pengelolaan bisnis yang efektif dan efisien. Informasi anggaran dimanfaatkan di seluruh proses manajemen bisnis kendatipun aplikasi anggaran adalah dalam fungsi perencanaan dan pengendalian.

Penyusunan Anggaran dilakukan hanya jika tersedia informasi akuntansi pertanggung jawaban yang mengukur berbagai sumber ekonomi yang disediakan bagi tiap manajer yang bertanggungjawab dalam usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam tahun anggaran. Anggaran operasi biasanya mencakup satu tahun dan menyajikan pendapatan dan beban yang direncanakan untuk tahun dianggarkan. Anggaran memiliki karakteristik berikut: 1). Anggaran mengestimasi potensi laba satuan bisnis; 2). Anggaran pada umumnya mencakup periode satu tahun; 3). Anggaran merupakan komitmen manajemen; 4). Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi ketimbang pihak yang menganggarkan.

Adapun Tujuan Penyusunan Anggaran adalah : 1). Untuk menyatakan harapan/sasaran perusahaan secara jelas dan formal, sehingga bisa menghindari kerancuan dan memberikan arah terhadap apa yang hendak di capai manajemen; 2). Untuk mengkomunikasikan harapan manajemen kepada pihak-pihak terkaitsehingga anggaran di mengerti, didukung dan dilaksanakan; 3). Untuk menyediakan rencana rinci mengenai aktivitas dengan maksud mengurangi ketidakpastian dan memberikan pengarahan yang jelas bagi individu dan kelompok dalam upaya mencapai tujuan bersama; 4). Untuk mengkoordinasikan cara /metode yang akan ditempuh dalam rangka memaksimalkan sumber daya; 5). Untuk menyediakan alat pengukur dan mengendalikan kinerja individu dan kelompok, serta menyediakan informasi yang mendasari perlu tidaknya tindakan koreksi. Rahayu Sri, Andry Arifian Rachman (2013:6)

Manfaat dari penganggaran dapat diuraikan sebagai berikut : a). Segala kegiatan dapat terarah pada pencapaian tujuan bersama; b). Dapat digunakan sebagai alat penilaian kelebihan dan kekurangan pegawai; c). Dapat memotivasi karyawan karena ada tujuan/sasaran yang akan dicapai; d). Menimbulkan rasa tanggung jawab pegawai; e). Menghindari pemborosan dan pembayaran yang kurang perlu Sumber daya yang dapat dimanfaatkan seefisien mungkin. Nafarin (2000:12)

Proses merupakan serangkaian langkah sistematis atau tahapan dan dapat dilakukan berulang kali, untuk mencapai hasil yang diinginkan. Jika di tempuh setiap tahapan itu secara konsisten mengarah pada hasil yang diinginkan.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah di Indonesia yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

II. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif, pendekatan yang digunakan pendekatan induktif, Unit analisis Rumah Sakit Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung, data yang di peroleh bersumber dari informan terdiri dari : 1). PPK SKPD; 2). Bendahara Pengeluaran; 3). Bagian Program dan Perencanaan, teknik pengumpulan data secara observasi langsung, studi

pustaka (dpa/rba) , jenis data primer , metode analisis yang di gunakan deskriptif , dan hal-hal lainnya yang termasuk dalam kategori metode penelitian.

III. Hasil Dan Pembahasan

Rumah Sakit Pemerintah merupakan organisasi pemberi pelayanan kesehatan yang bersifat sosial dan berorientasi non profit. Sebelum ditetapkannya RS Khusus Ibu dan Anak Kota Bandung menjadi Badan Layanan Umum daerah, pelayanan kesehatan seringkali mendapat kendala dalam hal pemenuhan kebutuhan anggaran dan pegawai, namun demikian rumah sakit berupaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan dengan pendapatan operasional rumah sakit sehingga kualitas pelayanan kesehatan dapat dipertahankan tanpa harus mengandalkan pemberian anggaran dari Pemerintah Daerah, agar kualitas pelayanan kesehatan dapat dipertahankan sehingga terwujudnya visi rumah sakit yaitu “Menjadi Rumah Sakit Rujukan Kesehatan Ibu dan Anak yang Unggul, Mudah, dan Nyaman”.

Tujuan dari penelitian yang pertama yaitu peneliti ingin mengetahui peraturan pembuatan anggaran pada RS dengan status BLUD seperti di RSKIA. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1). Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas; 2). Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya; 3). Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 44/PMK.05/2009 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum, Anggaran BLU merupakan penjabaran program kegiatan usaha dalam satuan uang berdasarkan pendapatan dan pengeluaran baik yang dana nya bersumber dari pendapatan operasional BLU maupun dari APBN.

Pendapatan BLU adalah pendapatan yang di peroleh yan terdiri dari: a). Jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat; b). Hibah; c). Hasil kerjasama BLU dengan pihak lain; d). Penerimaan yang bersumber dari APBN; e). Pendapatan lainnya, antara lain pendapatn jasa lembaga keuangan, pendapatan sewa,dan hasil penjualan aset tetap.

Biaya Operasional BLU meliputi biaya pelayanan dan biaya umum administrasi. Biaya pelayanan meliputi biaya pemakaian bahan, biaya pegawai, biaya pemeliharaan dan biaya lainnya yang berhubungan erat dengan kegiatan pelayanan. Sedangkan biaya umum administrasi meliputi biaya-biaya operasional yang tidak secara langsung berhubungan dengan pelayanan. Selain biaya pelayanan dan biaya umum ada juga biaya lainnya seperti biaya bunga dan biaya administrasi bank.

Belanja Modal merupakan anggaran yang diperlukan untuk program investasi yang dilaksanakan untuk meningkatkan kemampuan pelayanan BLU. Dalam hal program investasi yang akan dilaksanakan lebih dari satu tahun anggaran, maka dalam anggaran harus disajikan: 1). Anggaran seluruh investasi amapai selesai; 2). Anggaran investasi untuk tahun yang bersangkutan; 3). Realisasi investasi sampai dengan awal tahun anggaran. Ketiga hal tersebut dilengkapi pula dengan realisasi dan rencana penyelesaian secara fisik yang disajikan dalam bentuk persentase.

Selanjutnya penulis akan membahas Proses Penyusunan Anggaran pada RSKIA Kota Bandung. Sudah di jelaskan sebelumnya bahwa anggaran merupakan rencana kebutuhan untuk dimasa yang akan datang. Begitu pula di RSKIA Kota Bandung ada beberapa tahapan dalam proses penyusunan anggaran di awali dari: 1). Usulan / kebutuhan para user yang ada di pelayanan; 2) Usulan tersebut masuk ke Kepala Instalasi untuk di kaji yang di sebut sebagai renja (rencana kerja); 3). Setelah di kaji maka usulan /rencana itu masuk ke Pejabat Pelaksan Teknis Kegiatan (PPTK) dan di jadikan bahan sebagai Rencana Kerja Anggaran (RKA); 4). RKA masuk ke bagian Program dan Perencnaan untuk di input di SIMDA / SIRA kemudian di usulkan ke Direktur untuk di jadikan bahan DPA yang nantinya di sahkan oleh Walikota.

Prinsip prinsip pokok anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya prinsip-prinsip dan mekanisme penganggaran relatif tidak berbeda antara sektor swasta dengan sektor publik (Henley et al.,1990). Siklus anggaran meliputi empat tahap yang terdiri atas: a). Tahap persiapan anggaran (preparation), Pada tahap ini dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatanyang tersedia.Terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiranpengeluaran, hendaknya lebih dahulu melakukan penaksiran pendapatan secaralebih akurat; b). Tahap ratifikasi anggaran (budget ratification),Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan dituntut tidak hanya memiliki managerial skill namun juga harus mempunyai political skill, salesmanship, dan coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari seorang pimpinan sangat penting dalam tahap ini, karena dalam tahap ini pimpinan harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif; c). Tahap pelaksanaan anggaran (budget implementation), dalam tahap pelaksanaan anggaran,hal terpenting yang harus diperhatikan adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen; d). Tahap pelaporan dan evaluasi anggaran, tahap persiapan, ratifikasi dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahapan pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah di dukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka di harapkan tahap budget reporting and evaluation tidak akan menemui banyak masalah.

Menurut Permendagri Nomor 61 tahun 2007 bab 11 (sebelas) mengenai perencanaan dan penganggaran pada pengeloalan BLUD mencakup: 1). BLUD menyusun Renstra Bisnis BLUD; 2). Renstra bisnis BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup pernyataan visi, misi, program strategis, pengukuran pencapaian kinerja, rencana pencapaian lima tahunan dan proyeksi keuangan lima tahunan BLUD; 3). Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan; 4). Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan, agar tujuan organisasi dapat terlaksana sesuai dengan bidangnya dan berhasil dengan baik; 5). Program strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat program yang berisi proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sampai dengan kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul; 6). Pengukuran pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat pengukuran yang dilakukan dengan menggambarkan pencapaian hasil kegiatan dengan disertai analisis atas faktor-faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi tercapainya kinerja; 7). Rencana pencapaian lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat rencana capaian kinerja pelayanan tahunan selama 5 (lima) tahun; 8). Proyeksi keuangan lima tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memuat perkiraan capaian kinerja keuangan tahunan selama 5 (lima) tahun.

Tujuan selanjutnya yang ingin di bahas adalah untuk mengetahui unit kerja mana saja yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan anggaran. Menurut Permendagri Nomor 61 Tahun 2017 yang bertanggung jawab atas pengelolaan anggran adalah Pejabat Pengelola BLUD terdiri atas: 1). Pemimpin BLUD ; 2). Pejabat Keuangan; dan 3). Pejabat Teknis. Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas dan kewajiban: memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan,

dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD; menyusun renstra bisnis BLUD; menyiapkan RBA; mengusulkan calon pejabat pengelola keuangan dan pejabat teknis kepada kepala daerah sesuai ketentuan; menetapkan pejabat lainnya sesuai kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundangan-undangan; menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada kepala daerah.

Pejabat keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dan kewajiban: Mengkoordinasikan penyusunan RBA; menyiapkan DPA-BLUD; melakukan pengelolaan pendapatan dan biaya; menyelenggarakan pengelolaan kas; melakukan pengelolaan utang-piutang; menyusun kebijakan pengelolaan barang, aset tetap dan investasi; menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; dan menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan. Pejabat teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dan kewajiban: menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya; melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA; dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya.

IV. Penutup

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi berbagai pihak antara lain Dengan melakukan penelitian langsung di lapangan, 1). Penulis dapat memahami apa yang sebenarnya terjadi serta hambatan yang dihadapi dalam proses pelaksanaan penganggaran, sehingga dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemerintah daerah. Dan sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian akhir Sarjana (program S1) Program Studi Manajemen Keuangan di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Manajemen Bisnis. 2). Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Penulis berharap agar penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi pemerintah daerah dan rumah sakit dalam rangka pelaksanaan penyusunan anggaran biaya pegawai. 3). Peneliti Lain Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi peneliti selanjutnya.

Daftar Pustaka

- Haruman, Tendi dan Sri Rahayu 2007. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*. Bandung: Graha Ilmu.
- Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*: ANDI
- Nafarin, M. 2004. *Penganggaran Perusahaan*. Banjarmasin: Salemba Empat.
- Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44 /PMK.05/2009 Tentang Rencana Bisnis dan Anggaran Serta Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
- Puryana, P. Pulung. 2014. *Anggaran Perusahaan*. Bandung: STEMBI Bandung Business School.
- Rahayu, Sri dan Andry Arifian Rachman. 2013. *Penyusunan Anggaran Perusahaan*: Graha Ilmu.